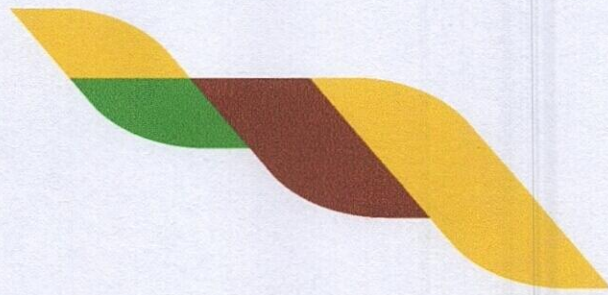


**LAPORAN BULANAN BPP PROVINSI PAPUA TENGAH
BULAN JANUARI 2025**



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

**WILAYAH BPP PAPUA TENGAH
POKJA PAPUA SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF DAN POLHUKAM
TAHUN 2025**



**PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**
JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com

Nomor : 06/II/2025/BPP.PT

Nabire, 10 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : Laporan Bulanan BPP Januari
2025

Kepada
Yth. **Kanwil DJPB
Provinsi Papua**

di

Jayapura.

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.
2. Laporan Bulanan BPP Papua Tengah Bulan Januari 2025
3. Demikian untuk menjadi Maklum.

Nabire, 10 Februari 2025

Anggota BP3OKP Papua Tengah



Irjen Pol (P) Drs. PIETRUS WAINE, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA).....	5
B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK	5
C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATANPEMBANGUNAN.....	6
D. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	6

Ringkasan Eksekutif

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi) maka terdapat beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Anggota BPP Papua Tengah Bersama Dengan Pokja di Bulan Januari ini diantaranya adalah :

1. Penyusunan Program dan Kegiatan BPP Papua Tengah Tahun 2025
2. Pelayanan Kesehatan Di RSUD Nabire
3. Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Milik Provinsi Papua Tengah
4. Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan P3K dan CPNS Tahun 2025
5. Program Pengelolaan SMKS Terintegrasi BLK KOMUNITAS,LKP dan PKBM
6. Seleksi DPRPT Khusus

Program-Program kerja yang telah dijalankan Oleh BPP bertujuan untuk tercapainya visi-misi BPP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera” dengan salah satu misinya adalah: Memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat untuk menuju Papua Sehat. Sasaran utama dari misi ini adalah tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk. Sehingga pada Tanggal 17 Januari 2025 BPP melakukan Koordinasi terkait pelayanan Kesehatan Bersama Bupati Nabire, Ketua MRP Papua Tengah, Dinas Kesehatan Papua Tengah, DPRD Nabire dan Kepala RSUD. Dan Juga Rapat Koordinasi Percepatan Layanan Dasar, Masyarakat Sektor Kesehatan untuk Pembangunan RS Rujukan Provinsi Papua Tengah di Jakarta. Selain itu Adapun Program lain seperti Verifikasi dan Validasi Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah 2024-2029. Dengan Terpilihnya anggota DPRD, diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang berpihak kepada Masyarakat, mempercepat pembangunan Daerah, menjadi anggota legislatif yang mencerminkan aspirasi rakyat.

Demikianlah beberapa Program Kerja BPP Provinsi Papua Tengah di Bulan Januari yang dapat kami sampaikan.

A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)

Adapun Kegiatan anggota BPP Provinsi Papua Tengah bersama dengan Pokja selama bulan Januari 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

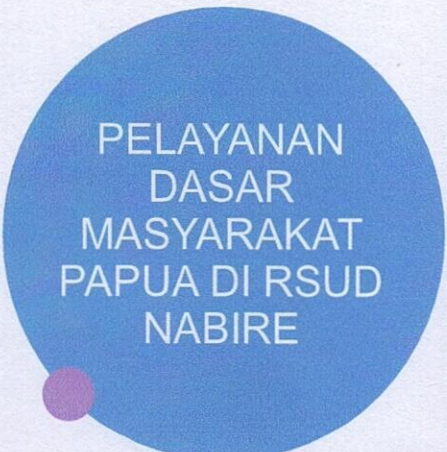
No	KEGIATAN PRIORITAS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)	MISI RIPP
01	Penyusunan Program dan Kegiatan BPP Papua Tengah Tahun 2025	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Polhukam
02	Pelayanan Kesehatan Di RSUD Nabire	Papua Sehat
03	Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Milik Provinsi Papua Tengah	Papua Sehat
04	Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan P3K dan CPNS Tahun 2025	Papua Produktif, Papua Sehat dan Papua Cerdas
05	Program Pengelolaan SMKS Terintegrasi BLK KOMUNITAS, LKP dan PKBM	Papua Produktif dan Papua Cerdas
06	Seleksi DPRPT Khusus	Papua Polhukam

1. Papua Sehat

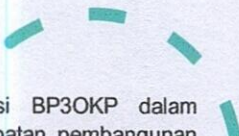
Adapun potret Kegiatan Pokja Papua Sehat selama bulan Januari 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan di RSUD Nabire
- Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Milik Provinsi Papua Tengah

a. Pelayanan Kesehatan di RSUD Nabire



PELAYANAN
DASAR
MASYARAKAT
PAPUA DI RSUD
NABIRE

- 
- Sesuai Tugas dan Fungsi BP3OKP dalam melaksanakan SHEK percepatan pembangunan dan pelaksanaan OTSUS Papua sebagaimana dirumuskan dalam **kerangka berpikir RIPP Tahun 2022-2041**, salah satu dimensi pembangunan adalah **Masalah Akses dan Pelayanan Dasar Masyarakat Papua Sektor Kesehatan**.
 - Pengaduan masyarakat orang asli papua (OAP), akan Pelayanan RSUD Nabire, baik secara lisan maupun secara media online (grup Wa, Facebook

BPP Papua Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelayanan RSUD Nabire pada tanggal 17 Januari 2025 melibatkan Pemerintah Kabupaten Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, MRP Papua Tengah, DPRP Papua Tengah dan Pihak Rumah sakit.

PELAYANAN DASAR MASYARAKAT PAPUA DI RSUD NABIRE

Capaian SHEK
Pelayanan Dasar Masyarakat Papua Di RSUD Nabire dengan BPP Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, MRP Papua Tengah dan DPR Papua Tengah

Telah Merumuskan bersama masalah dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pihak RSUD Nabire sebagai BLUD serta masalah dan kendala yang dihadapi oleh Pasien dalam Pelayanan di RSUD Nabire

Telah merumuskan Solusi sebagai Tindaklanjut dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, Pihak RSUD Nabire serta masyarakat

Berikut beberapa masalah yang menghambat percepatan pelayanan Kesehatan di RSUD Nabire sebagai berikut

- 1 RSUD Nabire selama ini melayani masyarakat dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah (Dogiyai,Deiyai ,Paniai,intan jaya,Puncak,Puncak Jaya) termasuk masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 2 Pembiayaan di RSUD Nabire selama ini hanya dibiayai oleh APBD Kabupaten Nabire tanpa ada dukungan pembiayaan subsidi atau penyertaan modal dari Kabupaten lain.
- 3 Kondisi standar pelayanan minuman (SPM) di RSUD Nabire pada saat ini masih belum terpenuhi.
- 4 Provinsi Papua Tengah belum memiliki Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi Papua Tengah.
- 5 Masih terdapat utang pengadaan obat sebesar Rp.42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar) sehingga terjadi kelangkaan obat di RSUD Nabire;
- 6 Kesadaran masyarakat akan pentingnya Kesehatan masih rendah, sehingga pelayanan dan administrasi di RSUD Nabire tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti KTP,BPJS yang merupakan persyaratan utama dari pelayanan Kesehatan tidak dapat terpenuhi.
- 7 Penggunaan dana OTSUS yang diperuntukkan di bidang Pendidikan,Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi dibatasi dengan pembagian presentasi dari Pemerintah Pusat, sehingga apabila terjadi kekurangan disalah satu bidang seperti kasus di RSUD Nabire, Pemerintah Daerah Kabupaten sulit untuk memprioritaskan dengan mengambil/mengalihkan dana dari salah satu bidang yang lain.

Adapun beberapa Solusi yang disepakati dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak sebagai berikut :

- 1 Dinas PUPR Provinsi Papua telah membangun bak penampungan air dan diharapkan dapat memperbaharui sanitasi air dan penambahan pembangunan perumahan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan RSUD Nabire;
- 2 Perlu adanya kebijakan dan strategi khusus oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, agar masyarakat dapat terlayani untuk membuat KTP sebagai syarat utama dalam pelayanan Kesehatan seperti BPJS, Kartu OTSUS Sehat dan layanan Kesehatan lainnya;
- 3 BP3OKP Papua Tengah akan mengundang 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk membicarakan pendanaan pelayanan Kesehatan RSUD Nabire serta membiayai masyarakat yang berasal dari 8 Kabupaten;
- 4 Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan milik Provinsi Papua Tengah untuk mengurangi beban pelayanan pasien pada RSUD Nabire;
- 5 Upaya penyelesaian beban pembiayaan obat yang belum diselesaikan oleh RSUD Nabire, akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai regulasi yang berlaku dengan melibatkan Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dan BPKP Perwakilan Papua;
- 6 Penyelesaian pengelolaan Tata Kelola RSUD Nabire diselesaikan secara bertahap sesuai prioritas;
- 7 Harmonisasi regulasi penganggaran dana OTSUS didasari dengan presentasi tetapi didasari sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah.
- 8 Revitalisasi secara menyeluruh manajemen RSUD.Nabire
- 9 Pengawasan atau audit rutin oleh BPKP selain inspektorat kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah
- 10 Akan ada Evaluasi Rutin dari BP3OKP,MRPPT,DPRPT bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire dan RSUD Nabire.
- 11 BP3OKP akan melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk fleksibilitas penggunaan anggaran dalam bidang pendidikan,Kesehatan dan ekonomi.

Rapat Koordinasi dan
Evaluasi Percepatan
Pelayanan RSUD Nabire



ISU PELAYANAN DI RSUD NABIRE DAN LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAYANAN KESEHATAN KE DEPAN DI RSUD NABIRE

Wakil bupati Nabire



Membahas beberapa isu, pembinaan RSUD Nabire, jika ada pasien yang membutuhkan pelayanan pengobatan harus cepat dilayani, dan semoga melalui rapat ini kita dapat memperoleh point-point penting agar menjadi bahas evaluasi kita bersama.

Direktur RS Nabaire



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

- Beban Pelayanan
- Syarat utama wajib menggunakan KTP&BPJS semua orang Papua wajib memiliki KTP&BPJS
- Obat
 - Untuk pembelian satu jenis obat memerlukan waktu 2 minggu untuk sampai di nabire menggunakan kapal.
- Air dan kebijakan masyarakat dan menggunakan fasilitas rumah sakit.
- Utang dan upah/gaji pegawai terkait

Sekda Nabire



- Seperti yang kita tahu bahwa angka HIV di papua tengah sangatlah tinggi bahkan tertinggi di seluruh papua. Tercatat khususnya di daerah meepago seperti dogiyai, deyai dan paniai terinfeksi HIV, hal ini perlu menjadi acuan kita kedepannya agar lebih diperhatikan.
- Anggaran APBD dibidang kesehatan papua tengah harus lebih di perhatikan

MRP



Saya secara khusus berbicara masalah yang dihadapi OAP banyak OAP yang meninggal karena beberapa isu, beberapa hari ini kami mendengar isu kurang baik dari RSUD Nabire terkait pelayanan yang diberikan, kami berharap agar tolong lebih diperhatikan lagi oleh para medis dan juga terkait pendanaan oleh pemerintah daerah harus lebih diperhatikan karena ini menyangkut manusia.

DPDR



- masyarakat tidak tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit, masyarakat tidak tahu kalau obat dan tenaga medis itu dibayar, menurut saya ini perlu menjadi bahan untuk di sosialisasikan ke masyarakat agar lebih paham tentang hal-hal tersebut
- permasalahan penggunaan infus yang berlebihan sampai dibawah pulang, tolong diperhatikan.
- Masalah air bers
- Diagnosa dokter yang berbeda berdampak pada pasien dan obat yang terbuang-buang.

Kepala Dinas Kesehatan Pempov



- Perbaikan rumah sakit dinabire, setiap rumah sakit pasti terdapat Masalah.
- Padat masalah
- Padat biaya
- Padat politik
- Padat Hutang
- Masalah internal
- Masalah eksternal
- Kami selalu mengutamakan Air bersih
- Obat
- Dan selalu ada dukungan dari pempov
- Secepatnya kami akan mengeluarkan tindakan oleh karena itu
- dibutuhkan perhatian dari semua pihak agar bersinergi menyelesaikan masalah hutang yang menjadi akar masalah

b. Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Milik Provinsi Papua Tengah



Rapat Koordinasi, BP3OKP Gubernur ,memfasilitasi Bappnas tentang Rumah Sakit Daerah(RSUD) Kabupaten Nabire , Sekaligus Rumah Sakit Rujukan milik Pemerintah Provinsi Papua untuk segera dibangun Tahun anggaran 2025



2. Papua Politik Hukum dan Ham (POLKUMHAM)

Adapun potret Kegiatan Pokja Polhukam selama bulan Januari 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

- c. Seleksi DPRPP Papua Tengah
- d. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah

Mekanisme dan Hasil akhir Seleksi DPRPP Papua tengah

Peserta DPRPP Papua Tengah yang terdaftar awalnya sebanyak 300 orang

Telah diseleksi 34 orang dari peserta terdaftar

Kemudian dari 34 orang diseleksi ulang melalui pendahapan yang telah ditentukan, dan hasil akhir mencapai 11 orang terdiri dari 8 laki-laki perwilayah adat dan 3 Perempuan keterwakilan Perempuan.

SELEKSI ANGGOTA DPRPP PAPUA TENGAH TAHUN 2025

Capaian SHEK
POLHUKAM terkait
Seleksi DPRPP
Papua Tengah

Telah terleksi Anggota DPRPP Papua Tengah sesuai Ketentuan dan Mekanisme, prosedur yang telah ditetapkan UU Otsus Nomor 2 tahun 2021 Pasal 68.A dan turunanya dalam PP 106 dan 107

Telah ditetapkan Anggota DPRPP Papua Tengah terleksi oleh Panitia Seleksi melalui SK Pansel Nomor 200.1/33/Pansel-DPRPPT Tanggal 3 Februari 2025 dan telah diusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan sebagai DPRPPT Terpilih.

Kegiatan tadi panitia seleksi DPRPP Provinsi Papua Tengah, tanggal 14 Januari 2024, Hotel Mahavira Nabire



Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Terpilih



Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Tengah oleh DPRD Papua Tengah

Diusulkan kepada Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Terpilih

Selanjutnya menentukan jadwal Pelantikan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029

3. Papua Cerdas

Untuk mewujudkan visi Papua Cerdas adapun Kegiatan yang dilakukan BPP Bersama Inspektorat Papua Tengah pada Tanggal pada tanggal 8 Januari 2025 yaitu rapat Penyusunan Program pengawasan Anggaran dan Daya serap 2024. Melakukan laporan tentang koordinasi, kolaborasi pengawasan mulai perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pengendalian program dan anggaran tahun 2025. serta hasil refleksi evaluasi tahun 2024 yang mana pelaksanaannya terlihat daya serap rendah dari beberapa sumber anggaran.

Terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dalam sidang pleno Bersama MRP yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi OAP, termasuk penyediaan tenaga pendidik dan pendirian Universitas Negeri Papua Tengah, Kemudahan akses bagi OAP ke institute Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) agar anak-anak asli Papua memiliki kesempatan lebih besar dalam pendidikan Pemerintahan, Peningkatan layanan Kesehatan,

4. Papua Produktif

Adapun potret Kegiatan Pokja Papua Produktif selama bulan Januari 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

- c. Pelayanan Dasar Masyarakat Papua Dalam Pengembangan Ekonomi bersama Pemda Provinsi Papua Tengah
- d. Pembangunan Perpanjangan dan Pelebaran Bandara Douw Aturure Nabire
- e. Dokumen Tanah Perkantoran Pemda Provinsi Papua Tengah
- f. Pemasangan Jaringan Listrik

PELAYANAN DASAR MASYARAKAT PAPUA SEKTOR EKONOMI

Pertemuan dengan
Norbert Mote , Kepala
Dinas Perindagkop
Provinsi Papua Tengah



PELAYANAN DASAR MASYARAKAT PAPUA SEKTOR EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

Capaian SHEK
Kolaborasi
BP3OKP Papua
Tengah, Provinsi
Papua dengan
Kemenerian
Perhubungan, dan
Kementerian ATR –
BPN Pusat

Perpanjangan dan Pelebaran Bandara Udara
Douw Aturure.
Penerbangan perdana Transnusa air dan
sriwijaya air

Telah diterbitkan Sertifikat tanah elektronik
lahan perkantoran pemerintah provinsi papua
tengah

Telah terpasangnya jaringan Listrik (tiang,kabel)
kab deiyai dan dogiyai (mulai dari deiyai,tigi
barat,wagomani,ke puweta dogiyai
Rencana ke mapia,mapia Tengah ke piyaiye

5. Tata Kelola BPP Papua Tengah

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), Anggota dan Kelompok Kerja BPP Papua Tengah telah Menyusun Program dan Kegiatan Kerja bulanan, triwulan dan tahunan sebagai acuan kerja selama tahun 2025.

Berikut rekapan program dan kegiatan kerja BPP Papua Tengah.

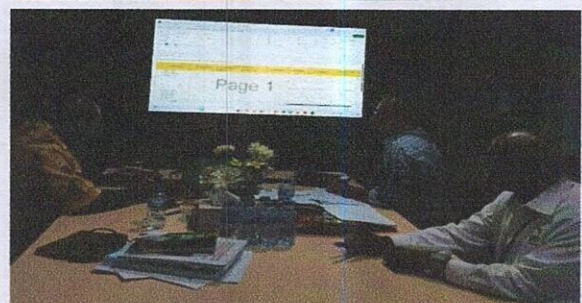
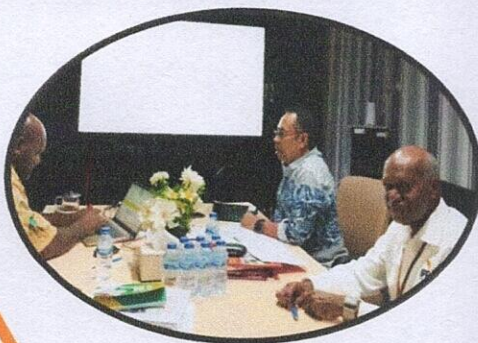
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPP PAPUA TENGAH TAHUN 2025

Capaian
Penyusunan
Program dan
Kegiatan BPP
Papua Tengah
Tahun 2025

Telah Menyusun rencana
Kegiatan Mingguan, Bulanan
dan Triwulan Pokja Papua
Sehat, Papua Cerdas, Papua
Procuktif dan Papua Polhukam

Telah Menyusun Rencana
Kerja Kegiatan Tahunan
Pokja Papua Sehat, Papua
Cerdas, Papua Procuktif
dan Papua Polhukam

**Foto Kegiatan Penyusun
Rencana Kerja Mingguan,
Bulanan dan Tahunan
Anggota BPP beserta Pokja**



Program Rencana Kerja Tiga Bulan Januari- Maret 2025, Anggota BP3OKP Beserta Pokja

No	Nama Anggota BPP	Pelaksanaan Kegiatan		Objek Kegiatan	Misi RIPP	Jenis Kegiatan	Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
		Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Kegiatan					
01	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum, KBP (Purn) Drs A/B. Maturbongs, S H, Yulianus Kuayo, SH, dr. Silvanus Ukago, dan Ruben Magai, SIP	Januari, 13-17	Kantor KPPN-BPP PT	Menyusun Rencana Kerja Mingguan, Bulanan dan Tahunan Anggota BPP beserta Pokja	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam	Rapat Internal	tersusunnya program kerja pokja mingguan, bulanan dan tahunan	
2	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum, KBP (Purn) Drs A/B. Maturbongs, S H, Yulianus Kuayo, SH, dr. Silvanus Ukago, dan Ruben Magai, SIP	Januari 15	Kantor KPPN-BPP PT	Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan RS. Rujukan di Papua Tengah Bersama Kadis Kesehatan	Pokja Papua Sehat	Rapat Koordinasi	pembahasan progres kesiapan dokumen dll	- hasil koordinasi di kadis kesehatan... - hasil koordinasi dengan kementerian kesehatan... - hasil koordinasi dengan Rujukan
3	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum, KBP (Purn) Drs A/B. Maturbongs, S H, Yulianus Kuayo, SH, dr. Silvanus Ukago, dan Ruben Magai, SIP	Januari, 20-31	Kantor KPPN-BPP PT	menyusun dokumen KAK, RAB, dan Proposal Kegiatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi program	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam	Rapat Koordinasi	tersusunnya proposal kegiatan	
4		sda	Kantor KPPN-BPP PT	Pengajuan Proposal Kegiatan	Anggota BP3OKP	proposal	tersampaikan proposal ke Sekretaris BPP	
5		sda	Kantor KPPN-BPP PT	Pesiapan pelaksanaan kegiatan terkait materi rapat, undangan, akomodasi, dll	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam	persiapan		

Program Rencana Kerja Tiga Bulan Januari- Maret 2025, Anggota BP3OKP Beserta Pokja

No	Nama Anggota BPP	Pelaksanaan Kegiatan		Objek Kegiatan	Misi RIPP	Jenis Kegiatan	Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
		Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Kegiatan					
6	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum	Januari, 20-31	Timika, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Nabire	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3K di 3 Kabupaten	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam	Evaluasi Pelaksanaan P3K	terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3K di 3 Kabupaten	rapat koordinasi kolaborasi dgn disdik dan bkd provinsi, inventarisir masalah, langkah 2 kerja/pupaya yg sdh dilakukan mereka
7	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum KBP (Purn) Drs A/B. Maturbongs, S H, Yulianus Kuayo, SH, dr. Silvanus Ukago, dan Ruben Magai, SIP	Februari 15-20	Timika, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai	Rapat Koordinasi Sinkronisasi, Kolaborasi	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam	Rapat Koordinasi	terlaksananya Rapat Koordinasi	
8	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum KBP (Purn) Drs A/B. Maturbongs, S H, Yulianus Kuayo, SH, dr. Silvanus Ukago, dan Ruben Magai, SIP	Maret, 10-13	Provinsi, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Timika	Sosialisasinya TUSI BP3OKP, Pokja dan Pemda	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam	Sosialisasi	tersosialisasinya TUSI BP3OKP dan Pokja	
9	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum, KBP (Purn) Drs A/B. Maturbongs, S H, Yulianus Kuayo, SH, dr. Silvanus Ukago, dan Ruben Magai, SIP	Maret, 18-21	BP3OKP Nabire	Persiapan konsep pengembangan Vokasi Terintegrasi dengan Pemda dan Mitra	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam. - Dinas Pendidikan Provinsi. - Dinas Pendidikan Kab Nabire, Dinas Pendidikan Dogiyai, Dinas Pendidikan Deiyai, Disnaker Provinsi dan 3 Kabupaten	Rapat	Tersusunnya materi	
10	Iren Pol (Purn) Drs Pietrus Waine, SH, M.Hum, KBP (Purn) Drs A/B. Maturbongs, S H, Yulianus Kuayo, SH, dr. Silvanus Ukago, dan Ruben Magai, SIP	Maret 24-25	Diijen Vokasi dan Layanan Pendidikan Khusus Jakarta dan Kementerian Tenaga Kerja	Percetakan Program Pendidikan Vokasi Terintegrasi SMK, LKP dan BLK	Pokja Sehat, Cerdas, Produktif dan Polhukam. - Dinas Pendidikan Provinsi. - Dinas Pendidikan Kab Nabire, Dinas Pendidikan Dogiyai, Dinas Pendidikan Deiyai, Disnaker Provinsi dan 3 Kabupaten	Audensi	tersepatinya program pengembangan vokasi terintegrasi di Papua Tengah	

B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS

Belum terdapat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).

C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA WILAYAH PAPUA TENGAH

Berdasarkan hasil evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah selama pelaksanaan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi selama bulan Januari 2025, memberikan Rekomendasi sebagai Upaya optimalisasi pelayanan percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Ada dua rekomendasi yaitu :

1. Sesuai Tusi dan Fungsi SHEK BPP

Adapun usulan yang disampaikan anggota BPP agar tercapainya Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Tengah antara lain:

- a Banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok kerja (papua sehat,papua cerdas,papua produktif dan papua polhukam) namun tidak dibarengin dengan dukungan biaya;
- b Perlu tindaklanjut pada rapat Pleno Anggota BPP bersama Presiden dan Wapres terkait Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Milik Provinsi Papua Tengah agar terealisasi mulai tahun 2025;
- c Perlu ada kebijakan khusus bagi Papua untuk menentukan Formasi CPNS sendiri sesuai kebutuhan daerah berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kerja masing-masing dinas dan badan. Sedangkan mekanisme penerimaan tetap dilakukan melalui sistem online dengan catatan dalam aplikasi penerimaan CPNS ditambahkan ruang/variabel tersendiri antara formasi OAP dan non OAP sesuai kuota 80% OAP dan 20% Non OAP;
- d Berkaitan dengan Penerimaan P3K dan CPNS, agar tenaga medis dan guru orang asli Papua (OAP) dapat diperbanyak atau diprioritaskan;
- e Percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran ekstrim di Provinsi Papua Tengah, maka program SMK Terintegrasi Balakai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sangkar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM menjadi Prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan bersama Pemerintah Daerah dan Yayasan Pelopor Pendidikan di Tanah Papua.
- f PP 106 tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam lampiran PP 106 agar dapat direvisi dan pengelolaan kewenangan dialihkan ke Provinsi, karena Kabupaten mengalami devisa anggaran ;
- g Pembagian presentasi anggaran OTSUS sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2021, dapat direview untuk tidak berpatokan pada presentasi, namun

diberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat menyesuaikan kondisi wilayah serta kebutuhan prioritas dari masing-masing Kabupaten/kota;

- h Berdasarkan huruf c.d dan e diatas, jika tidak mendapat dukungan penyelesaian maka akan berdampak pada masalah kejahatan konvensional/tradisional seperti pemalangan, pembunuhan, perampokan, pembakaran, pengrusakan kantor-kantor public/peerintah dan swasta, pencurian, narokoba, dan lain sebagainya.

2. Tata Kelola Sekretaritan BPP

BP3OKP sebagai lembaga Nonlembaga Negara yang melaksanakan Tugas dan Fungsi SHEK mengalami kendala dalam tata Kelola Keuangan sehingga BP3OKP terkesan tidak terlihat kinerja.

Berikut beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah sebagai berikut :

- a Belum terpenuhinya Hak Fasilitas berupa kendaraan, perumahan, asuransi kerja, THR hari-hari besar bagi Anggota dan Kelompok Kerja dan sekretariat BPP Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Perpres No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (BP3OKP)
- b Dalam Buku Saku tentang Dukungan Administratif dari Sekretariat Badan Pengarah Papua belum menguraikan Harga Satuan Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya tingkat kemahalan di wilayah Papua Tengah sehingga sangat menghambat pelaksanaan percepatan program dan kegiatan BPP Papua Tengah;
- c Belum tersedianya dana Cadangan/Kontigensi (keadaan/situasi darurat yang segera ditangani/direspon oleh BPP Papua Tengah, sehingga kasus pembunuhan, kasus perkelahian antar suku, pemalangan jalan, korban akibat kecelakaan, bencana alam mengalami keterlambatan dalam penanganannya;
- d Banyak kegiatan BPP Papua Tengah yang semestinya harus diketahui oleh Masyarakat public, namun selama ini tidak terpublikasi sama sekali dikarenakan belum tersedianya biaya Publikasi/Media di KPPN Nabire;
- e Kedudukan BPP Papua di masing-masing Provinsi, sesuai pasal 68.a UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, agar disamakan dengan Badan-Badan Khusus lain yaitu MRPT, DPRPPT, DPRK, BP3OKP dan DPD RI dalam kedudukan dan penganggaran.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan Kegiatan BPP Papua Tengah di bulan Januari 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SHEK diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan semua pihak terutama Pemerintah Daerah provinsi Papua Tengah, MRPPT, DPRPT, DPRDPT, dan para Bupati serta mitra pembangun lainnya.

Demikian Laporan Bulanan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih